

Katalog: 9302008.14



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA 2016 - 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**



**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
MENURUT LAPANGAN USAHA
2016 - 2020**

<https://riau.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA
2016-2020**

ISSN : 2406-842x
Nomor Publikasi : 14000.2126
Katalog BPS Provinsi Riau : 9302008.14
Ukuran Buku : 21 cm X 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv+72 halaman

Naskah
BPS Provinsi Riau

Penyunting
BPS Provinsi Riau

Gambar Kulit
BPS Provinsi Riau

Diterbitkan Oleh
© BPS Provinsi Riau

Dicetak Oleh
CV M.N. Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA 2016-2020**

Pengarah

Drs. Misfaruddin, M.Si.

Penanggung Jawab Umum

Urip Widiyantoro, S.Si.

Editor

Urip Widiyantoro, S.Si.

Sri Mulyani, S.S.T., M.Stat.

Penulis

Sri Mulyani, S.S.T., M.Stat.

Bekti Indasari, S.Stat.

Pengolah Data

Bekti Indasari, S.Stat.

<https://riau.bps.go.id>

Kata Pengantar

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 merupakan publikasi tahunan yang bertujuan untuk memberikan gambaran perekonomian secara makro melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi publikasi PDRB yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau sehingga lebih memudahkan bagi pembaca yang ingin melihat perbandingan PDRB antarkabupaten/kota.

Dalam publikasi ini disajikan data PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010, serta disajikan beberapa jenis tabel turunannya. Pola data PDRB masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda menyesuaikan struktur ekonomi dan perkembangan ekonominya. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi yang digunakan, letak geografis, infrastruktur, dan sebagainya.

Saran dan masukan dari pengguna data sangat diharapkan demi meningkatnya kualitas publikasi ini di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2021
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau,



Misfaruddin

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL ANALISIS	ix
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
INFOGRAFIS	1
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Pengertian PDRB	5
1.3 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	6
1.4 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	6
BAB II. URAIAN LAPANGAN USAHA	11
2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13
2.2 Pertambangan dan Penggalian	17
2.3 Industri Pengolahan	19
2.4 Pengadaan Listrik dan Gas	24
2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	26
2.6 Konstruksi	27
2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28
2.8 Transportasi dan Pergudangan	29
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32
2.10 Informasi dan Komunikasi	33
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi	35
2.12 Real Estat	41
2.13 Jasa Perusahaan	41
2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	43
2.15 Jasa Pendidikan	43
2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	44
2.17 Jasa Lainnya	45

BAB III. PERKEMBANGAN PDRB ANTARDAERAH	47
A. PDRB dengan Migas	49
3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota	49
3.2 Kontribusi PDRB dengan Migas Kabupaten/Kota	50
3.3 PDRB Per Kapita dengan Migas Kabupaten/Kota	53
B. PDRB tanpa Migas	54
3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota	54
3.5 Kontribusi PDRB tanpa Migas Kabupaten/Kota	55
3.6 PDRB Per Kapita tanpa Migas Kabupaten/Kota	56
3.7 Struktur Ekonomi Tiga Lapangan Usaha Utama tanpa Migas Kabupaten/Kota.....	57
LAMPIRAN TABEL-TABEL POKOK	59

Daftar Tabel Analisis

Tabel	Halaman
1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	9
1.2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	10
3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen), 2016-2020	50
3.2. Kontribusi PDRB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen), 2016-2020	51
3.3. Struktur Ekonomi dengan Migas yang Terbesar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen), 2019	52
3.4. PDRB Per Kapita dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (juta rupiah), 2016-2020	53
3.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen), 2016-2020	54
3.6. Kontribusi PDRB tanpa Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen), 2016-2020	55
3.7. PDRB Per Kapita tanpa Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (juta rupiah), 2016-2020 ..	57
3.8. Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Kegiatan Ekonomi Primer, Sekunder, dan Tersier (persen), 2016-2020	58

Daftar Tabel Lampiran

Tabel		Halaman
1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	61
2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	61
3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	62
4	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	62
5	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	63
6	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	63
7	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	64
8	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	64
9	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	65
10	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	65
11	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar Atas Dasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	66
12	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	66
13	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	67

Tabel	Halaman
14 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	67
15 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	68
16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	68
17 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	69
18 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	69
19 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	70
20 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	70
21 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	71
22 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	71
23 Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	72
24 Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	72

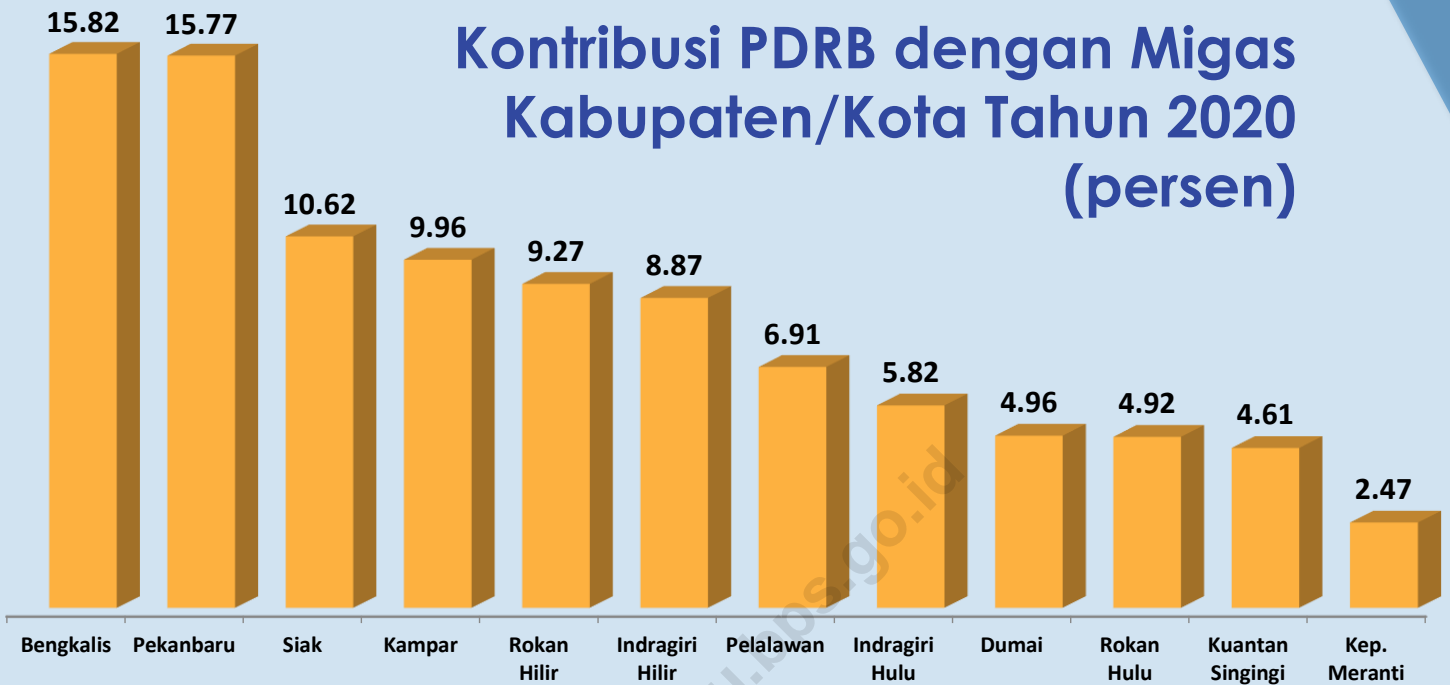
Ringkasan Eksekutif

C OVID-19 sangat berdampak pada perekonomian Riau tahun 2020 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi PDRB dengan minyak dan gas bumi (migas) turun -1,12 persen. Lapangan usaha yang paling terdampak terutama pada sektor yang bergerak di bidang jasa, di antaranya: Jasa Perusahaan; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Lainnya.

Jika dilihat dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, sebanyak lima kabupaten/kota masih tumbuh positif. Sementara ekonomi di tujuh kabupaten/kota lainnya mengalami kontraksi. Kota Pekanbaru sebagai pusat jasa mengalami kontraksi paling dalam dengan penurunan 4,38 persen. Kemudian posisi terdalam kedua adalah Kabupaten Bengkalis dengan kontraksi 3,30 persen. Meski juga terdampak COVID-19, penyebab utama kontraksi ekonomi yang terjadi di Bengkalis disebabkan struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis yang ditopang 56 persen dari migas sementara produksi migas beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan secara alami (*natural declining*).

Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih menunjukkan kinerja positif. Lapangan usaha dominan yang masih menunjukkan kinerja positif yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi beberapa kabupaten/kota masih tercatat tumbuh positif meski melambat, di antaranya: Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

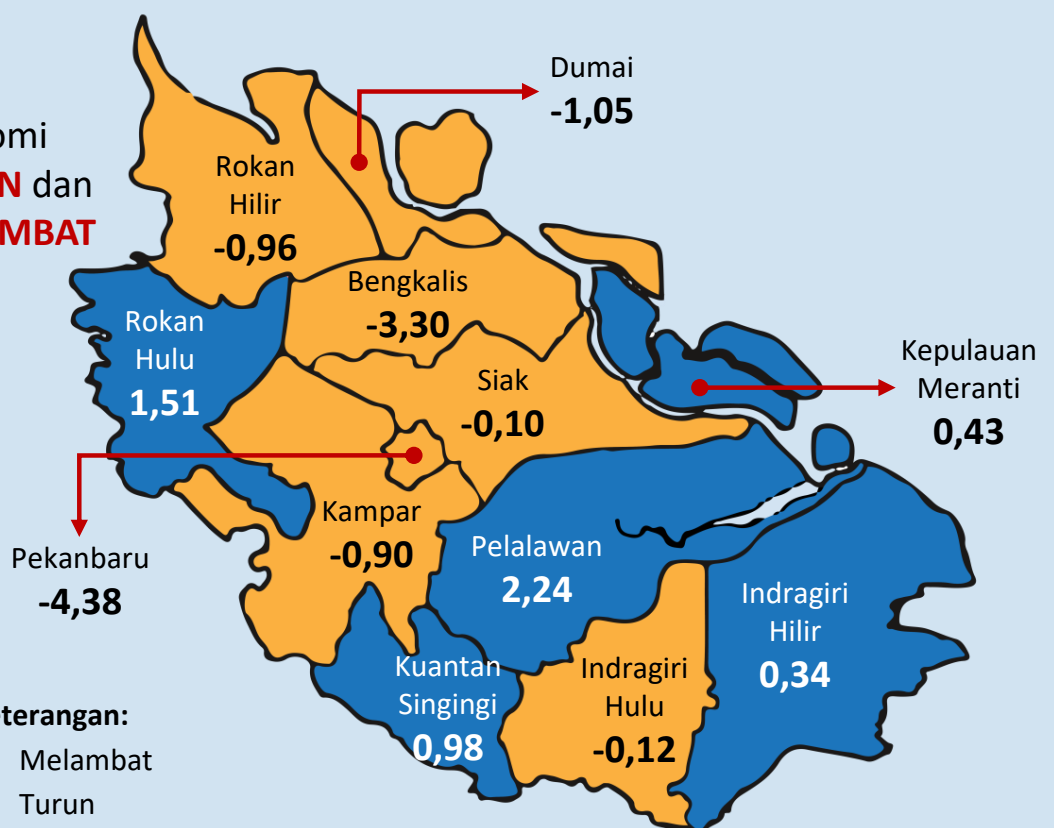
PDRB KABUPATEN/KOTA DI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA



Laju Pertumbuhan PDRB dengan Migas Kabupaten/Kota Tahun 2020 (persen)

TAHUN 2020

laju pertumbuhan ekonomi
7 kabupaten/kota **TURUN** dan
5 kabupaten/kota **MELAMBAT**



BAB I

Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pengertian PDRB
- 1.3 Kegunaan PDRB
- 1.4 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah

mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta.

1.2 Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau

dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.3 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan regional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu wilayah. Lapangan-lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga

berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.4 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan PDRB untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDB atau PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi, dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain:

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara nasional maupun internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan mengubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan *saving*, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;

- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB dan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja *Supply and Use Tables* (SUT) yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB Tahun Dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 di antaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB dan PDRB tahun dasar 2010 di antaranya:

- Konsep dan cakupan: Perlakuan *Work-in Progress* (WIP) dan *Cultivated Biological Resources* (CBR):

Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum dipanen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan

seperti: nilai sapi perah yang belum menghasilkan susu (laktasi), nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- Metodologi: Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM).
- Valuasi: Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*basic price*). Merupakan harga keekonomian barang dan jasa di tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- Klasifikasi: Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

¹ SNA 1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

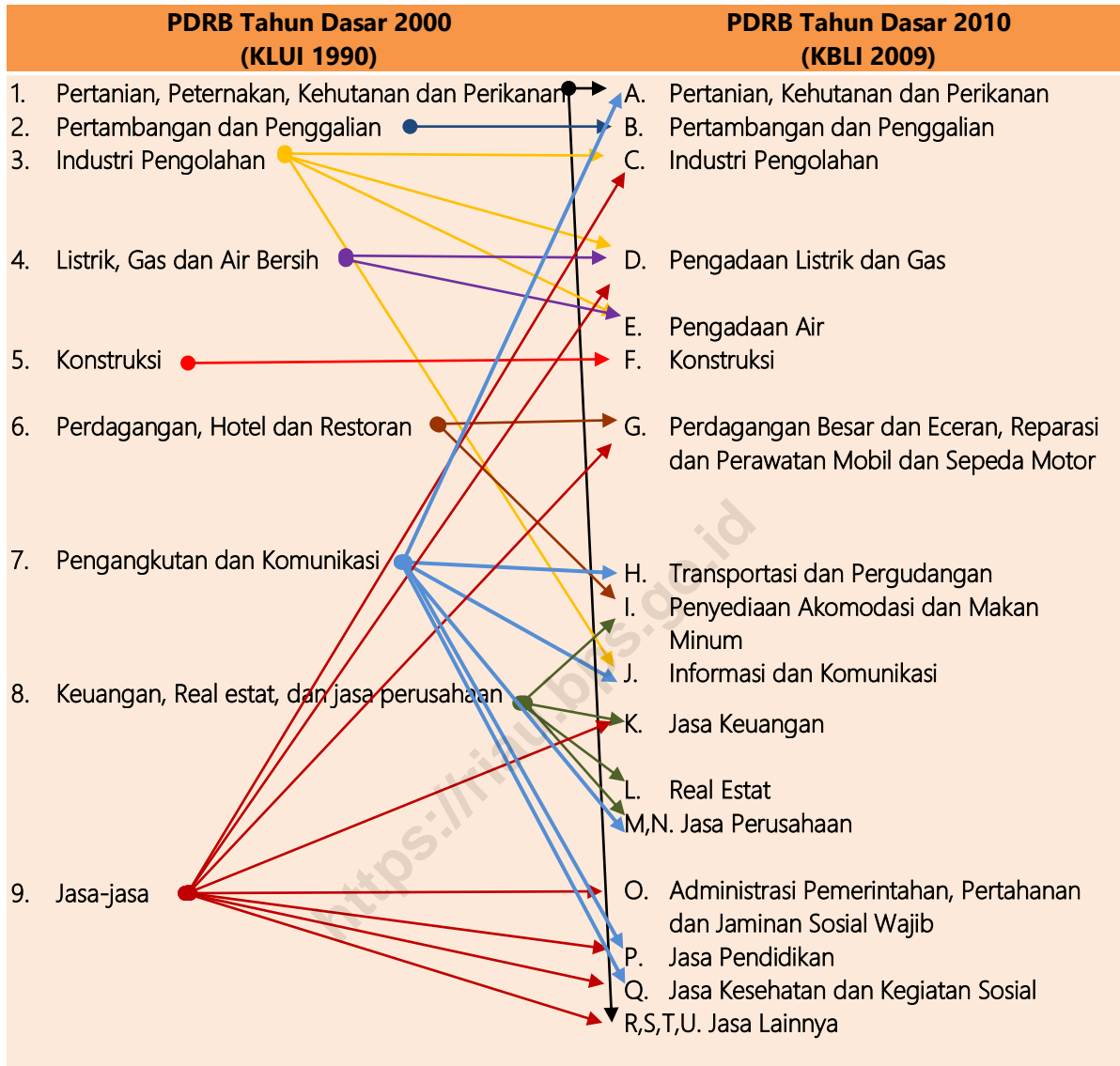
Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC)	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun

Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990), sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010



BAB II

Uraian Lapangan Usaha

- 2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 2.2 Pertambangan dan Penggalian
- 2.3 Industri Pengolahan
- 2.4 Pengadaan Listrik dan Gas
- 2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang
- 2.6 Konstruksi
- 2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 2.8 Transportasi dan Pergudangan
- 2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 2.10 Informasi dan Komunikasi
- 2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi
- 2.12 Real Estat
- 2.13 Jasa Perusahaan
- 2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- 2.15 Jasa Pendidikan
- 2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 2.17 Jasa Lainnya

Bab II Uraian Lapangan Usaha

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Usaha ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi

yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan dari kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dan lain-lain), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dan lain-lain). Keseluruhan komoditas tersebut masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Riau dan Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen dan Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data

struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditas sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Riau dan Subdit Statistik Hortikultura BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman

Hortikultura (SOUH).

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan di antaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha

peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dan sebagainya.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan

penangkapan satwa liar, serta penangkaran tumbuhan/satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari *furskin*, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian tumbuhan/satwa liar, baik yang hidup di darat maupun laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut, dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan

proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Bidang Neraca Wilayah dan Analisis BPS Provinsi Riau. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar serta penangkaran tumbuhan/satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan tumbuhan/satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, Subdit Statistik Kehutanan BPS, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, *crustacea*, *mollusca*, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau serta Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh

dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditas pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Di samping itu, komoditas lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources* (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang

dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress* (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditas yang dicakup dalam kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi

Subkategori pertambangan minyak, gas (migas) dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam, serta pencarian cairan hidrokarbon.

Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM. Data harga/indikator harga juga diperoleh dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS; data struktur biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan dan Penggalan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price* (ICP), sedangkan harga gas bumi menggunakan harga pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit,

bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama seperti pada Subkategori Pertambangan Migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara diperoleh dari Dinas ESDM Provinsi Riau dan Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM; Sedangkan data-data lain yang dibutuhkan diperoleh dari Statistik Pertambangan Non Migas BPS, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Subkategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga,

timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel, kobalt, dan lain-lain; termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya antara lain pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel, kobalt, dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak, dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir, dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditas penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditas garam hasil penggalian. Output dan

produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik Penggalian Tahunan. Sementara itu PDRB triwulan diestimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi (DNP) BPS.

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklun atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi, dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti pengilangan minyak dan gas bumi, yang

meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, *gasoline*, minyak tanah, gas etane, propane, dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk di sini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit, dan kokas. KBLI 2009: kode 19.

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu industri makanan dan industri minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, seperti air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi, dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, *snuff*, *chewing* dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan

awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (*snuff*), rokok kretek, rokok putih, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12.

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu industri tekstil dan industri pakaian jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan, dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, serta pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti seprai, taplak meja, gorden, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat

dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15.

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/ pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, serta alat dapur dari kayu, rotan, dan bambu. KBLI 2009: kode 16.

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu industri kertas dan barang dari kertas, dan industri pencetakan dan reproduksi media rekaman. Industri kertas dan barang dari kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan.

Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran, dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu *image* dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu industri kimia dan industri farmasi dan obat tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan nonorganik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri farmasi dan obat tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat

darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu, dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, dan pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen, dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk di sini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih,

potongan atau bongkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: hasil industri besi dan baja dasar, hasil penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 24.

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, *container*/wadah, dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan, dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26, dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam subkategori industri mesin dan perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan

tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian, dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28.

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara, dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri furnitur mencakup pembuatan mebel dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen, dan keramik. Pengolahan pembuatan mebel adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan, dan pelapisan. Perancangan produk, baik untuk estetika dan kualitas fungsi, adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebel cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31.

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan, dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data industri pengolahan batubara dan pengilangan minyak dan gas bumi terdiri dari data produksi pengilangan migas diperoleh dari PT Pertamina RU II Dumai dan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Data produksi/indikator produksi industri batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas Kementerian ESDM, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran BPS, sedangkan indikator harga untuk industri batubara diperoleh dari Direktorat Statistik

Harga BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas BPS.

Sumber data industri makanan dan minuman sampai dengan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan terdiri dari produksi/indikator produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Data struktur biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK BPS ditambah dengan berbagai survei khusus yang dilakukan DNP BPS.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan industri pengolahan migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk industri batubara sampai dengan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin

dan peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Dalam penghitungan NTB Industri Pengolahan subkategori-subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin, dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan nonmakanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol, dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem

tata udara.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman, dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan adalah data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga

penjualan dan harga pembangkitan, baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepri setiap triwulan dan juga Statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan gas alam, gas buatan, uap/air panas, udara dingin, dan produksi es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, dan penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi, dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan pengadaan uap/air panas, udara dingin, dan produksi es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan, dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan

makanan/minuman dan tujuan nonmakanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT PGN Area Pekanbaru dan PT PGN Area Dumai setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan

pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan nilai tambah bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan, dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan sampah/limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan, dan pembersihan sampah dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber data produksi adalah Statistik Air Bersih dari Subdit Statistik Pertambangan dan Energi BPS, APBD (Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Riau), data output sampah diperoleh dari Subdit Statistik IBS BPS, data harga diperoleh

dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS, serta data struktur biaya diperoleh dari Survei Tahunan Air Bersih BPS.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek, dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain konstruksi gedung tempat tinggal; konstruksi gedung bukan tempat tinggal; konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin

dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan output harga konstan, output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara diperoleh dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan konsumsi antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu, dan produk industri bukan migas dari Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Riau, produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas Kementerian ESDM, realisasi pengadaan semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar BPS. Indeks konstruksi dari Subdirektorat Statistik Konstruksi BPS.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan

dan pengeringan hasil pertanian, dan pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang atau "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri dan luar wilayah. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di *deflate* menggunakan Indeks

Harga Konsumen (IHK) umum.

Sumber data yang digunakan dalam kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah data output barang dari *commodity flow* pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan domestik serta impor barang dari Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provins Riau, Bea Balik Nama (BBN) 1 dan 2 dari Bapenda Provinsi Riau, IHK dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau, dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS, seperti SKSJ dan SKNP.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara, dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; angkutan udara; serta pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos, dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antarkota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter*/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia, dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaran wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pengangkutan darat dan hasil Sensus Ekonomi. Sedangkan

data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian produksi (jumlah penumpang berangkat dan jumlah barang yang dimuat) dengan harganya masing-masing. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari Bidang Statistik Distribusi Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari survei terhadap perusahaan angkutan laut, serta IHK jasa angkutan laut dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba dari

perusahaan pengangkutan laut dan hasil Sensus Ekonomi.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal feri.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Transportasi Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau, dan

penyeberangan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT ASDP Indonesia Ferry.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Provinsi Riau.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Data produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian produksi (jumlah penumpang yang berangkat dan jumlah barang yang diangkut) dengan harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh Bidang Statistik Distribusi Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan maskapai lainnya, serta IHK jasa angkutan

udara dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan, Pos, dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti PT Angkasa Pura II (Pekanbaru), PT Pelabuhan Indonesia Pekanbaru dan Dumai, dan beberapa perusahaan lainnya. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata BPS.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran

rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi subkategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman, dan rokok dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi, dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi komputer, dan teknologi informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, *leaflet*, kamus,

ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti *cd-rom* buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, *video tape* atau *disk* untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti *editing*, *cutting*, *dubbing* film, dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak, dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, serta penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan, dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi, dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer, dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer, dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara

output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, perusahaan di bidang televisi dan teknologi informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT Bakrie Telecom; dan PT Smartfren Telecom. Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,

seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP), *baitul maal wantanwil* (BMT), dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT,

dan jasa moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Kantor Pusat Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan Dana Pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung risiko-risiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak bertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak bertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi nonjiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga

konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga

konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal,

pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari OJK Provinsi Riau, PT Pegadaian, dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan *leasing* lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari OJK Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil

perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari OJK Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manajer investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Keegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia Perwakilan Riau yang terdiri dari pendapatan jasa

transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI Perwakilan Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Manajer Investasi

Manajer investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manajer investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manajer investasi diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-

perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara

pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli, rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak, dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi terkait. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ) BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi, dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain jasa hukum

dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah, dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan, dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan, dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa

konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan *drafting*, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran,

pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial

wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari realisasi APBN dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (K1, K2, K3) dari BPS; realisasi APBD dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); dan jumlah pegawai negeri sipil dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional XII Pekanbaru.

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup

pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan, dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet, dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan pendekatan produksi. Untuk NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Dinas Pendidikan Provinsi Riau; Kementerian Agama Provinsi Riau; berbagai survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh

tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup jasa rumah sakit; jasa klinik; jasa rumah sakit lainnya; praktik dokter; jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis; jasa pelayanan kesehatan tradisional; jasa pelayanan penunjang kesehatan; jasa angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*); jasa kesehatan hewan; dan jasa kegiatan sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial; Dinas Kesehatan Provinsi Riau; Dinas Sosial Provinsi Riau; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); berbagai survei khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS; dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga

kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/ indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi jasa kesenian, hiburan dan rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Balai Taman Nasional, dan data penunjang intern BPS (ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan survei-survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana

deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk, Susenas, Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Riau, dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang di dalamnya termasuk jasa pekerja domestik (asisten rumah tangga, satpam, tukang kebun, sopir, dan sejenisnya), dan Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan (di dalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri pengolahan, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/jasa pekerja domestik (asisten rumah tangga, satpam, tukang kebun, sopir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran per kapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei

intern BPS (Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga/SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu Susenas, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk, Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Riau (Publikasi Statistik Air Bersih), dan survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran BPS.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, badan regional dan lain-lain, termasuk *The Internasional Moneter Fund* (IMF), *The World Bank* (WB), *The World Health Organization* (WHO), *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *The Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC), dan lain-lain.

BAB III

Perkembangan PDRB Antardaerah

- 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota
- 3.2 Kontribusi PDRB dengan Migas Kabupaten/Kota
- 3.3 PDRB Per Kapita dengan Migas Kabupaten/Kota
- 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota
- 3.5 Kontribusi PDRB tanpa Migas Kabupaten/Kota
- 3.6 PDRB Per Kapita tanpa Migas Kabupaten/Kota
- 3.7 Struktur Ekonomi Tiga Lapangan Usaha Utama tanpa Migas Kabupaten/Kota

Bab III

Perkembangan PDRB Antardaerah

Bab ini memaparkan gambaran umum tentang kondisi perekonomian kabupaten/kota se-Provinsi Riau baik dengan migas maupun tanpa migas selama periode 2018-2020. Melalui ulasan ringkas ini dapat digambarkan perekonomian kabupaten/kota se-Provinsi Riau dalam menggali potensi sumber daya ekonomi masing-masing daerah. Indikator-indikator makro seperti laju pertumbuhan, kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam perekonomian, dan PDRB per kapita diharapkan dapat membantu memudahkan dalam perencanaan pembangunan.

A. PDRB dengan Migas

3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota

COVID-19 yang mulai muncul awal Maret 2020, menjadi penyebab utama terjadinya kontraksi ekonomi tahun 2020 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Tidak terkecuali Riau ikut terdampak dan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi turun hingga 1,12 persen (termasuk migas) atau 0,20 persen (tanpa migas).

Lapangan usaha yang paling terdampak COVID-19 adalah kegiatan yang bergerak di bidang jasa, di antaranya: Jasa Perusahaan; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Lainnya. Di sisi lain,

penurunan produksi minyak mentah ikut menekan pertumbuhan ekonomi sejak beberapa tahun terakhir. Meski demikian, penurunan laju pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2020 masih ditahan oleh naiknya permintaan CPO, kertas, dan bubur kertas yang menjadi komoditas unggulan Riau.

Perekonomian Riau secara umum sangat dipengaruhi oleh perekonomian global, terutama permintaan CPO, kertas, dan bubur kertas karena komoditas tersebut merupakan komoditas ekspor nonmigas utama Riau, selain juga pengaruh dari kegiatan migas. Gejolak harga yang terjadi di pasar internasional akan berimbas pada kinerja ekonomi Riau. Pada tahun 2020, harga minyak mentah tercatat anjlok hingga menyentuh 42 (US\$/barrel), namun secara bersamaan harga CPO justru meningkat.

COVID-19 dan beberapa fenomena ekonomi di atas tergambar dalam perekonomian kabupaten/kota tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2020 terlihat lebih bervariasi dibandingkan tahun 2019 (Tabel 3.1). Dari 12 dua belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, perekonomian di lima kabupaten/kota masih tumbuh positif sementara perekonomian di tujuh kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan atau kontraksi.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen), 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	4,66	4,58	0,98
2. Indragiri Hulu	3,49	3,78	-0,12
3. Indragiri Hilir	3,61	4,16	0,34
4. Pelalawan	3,63	3,87	2,24
5. Siak	1,09	1,47	-0,10
6. Kampar	1,91	3,86	-0,90
7. Rokan Hulu	4,18	4,92	1,51
8. Bengkalis	-1,69	-1,89	-3,30
9. Rokan Hilir	-0,28	0,65	-0,96
10. Kep. Meranti	4,03	2,64	0,43
11. Pekanbaru	5,39	5,99	-4,38
12. Dumai	5,34	5,60	-1,05
RIAU	2,35	2,81	-1,12

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tahun 2019 lalu hanya Bengkalis saja yang mengalami kontraksi. Namun tahun 2020 kabupaten/kota yang ikut mengalami kontraksi yaitu Indragiri Hulu, Siak, Kampar, Rokan Hilir, Pekanbaru, dan Dumai.

Pekanbaru sebagai pusat jasa mengalami kontraksi paling dalam dengan penurunan 4,38 persen. Kemudian posisi terdalam kedua adalah Bengkalis dengan kontraksi 3,30 persen. Meski ikut terdampak COVID-19, penyebab utama kontraksi ekonomi yang terjadi di Bengkalis disebabkan struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis yang ditopang 56 persen dari migas sementara produksi migas beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan secara alami (*natural declining*).

Sementara lima kabupaten/kota lainnya tumbuh melambat dibandingkan tahun 2019. Kabupaten/kota tersebut antara lain:

Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti. Meski di tengah pandemi COVID-19, beberapa lapangan usaha masih menunjukkan kinerja positif. Lapangan usaha dominan yang masih menunjukkan kinerja positif yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan.

3.2 Kontribusi PDRB dengan Migas Kabupaten/Kota

Pada tabel 3.2 dapat dilihat kontribusi PDRB kabupaten/kota dengan migas se-Provinsi Riau selama periode 2018-2020. Kontribusi ekonomi kabupaten/kota yang memiliki sumber daya migas sangat berpengaruh terhadap perekonomian Riau.

Perekonomian Riau seperempatnya bergantung dari minyak mentah dengan sumur minyak yang tersebar di beberapa kabupaten. Salah satu kabupaten yang paling signifikan dalam menyumbang perekonomian Riau dari minyak mentah adalah Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2020, kontribusi PDRB Bengkalis dalam membentuk PDRB Riau sebesar 15,82 persen, kemudian diikuti oleh Siak, Kampar, dan Rokan Hilir yang masing-masing berkontribusi sebesar 10,62 persen; 9,96 persen; dan 9,27 persen.

Kontribusi PDRB Bengkalis dengan migas tahun 2020 jauh menurun dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan harga minyak mentah anjlok hingga menyentuh 42 (US\$/barrel), selain juga terjadi penurunan volume produksi minyak mentahnya.

Tabel 3.2 Kontribusi PDRB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen), 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	4,02	4,16	4,61
2. Indragiri Hulu	5,33	5,43	5,82
3. Indragiri Hilir	7,94	8,18	8,87
4. Pelalawan	6,08	6,22	6,91
5. Siak	11,12	10,72	10,62
6. Kampar	10,18	10,08	9,96
7. Rokan Hulu	4,26	4,42	4,92
8. Bengkalis	19,61	18,46	15,82
9. Rokan Hilir	10,37	9,73	9,27
10. Kep. Meranti	2,40	2,40	2,47
11. Pekanbaru	14,33	15,49	15,77
12. Dumai	4,36	4,71	4,96
Total	100	100	100

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kabupaten/kota lainnya yang juga mempunyai migas di antaranya: Siak dengan kontribusi PDRB 10,62 persen; Kampar 9,96 persen; Rokan Hilir 9,27 persen; Pelalawan 6,91 persen; Indragiri Hulu 5,82 persen; Rokan Hulu 4,92 persen; Kota Dumai 4,96 persen; dan Kepulauan Meranti 2,47 persen.

Sementara itu, Pekanbaru meskipun bukan merupakan kota penghasil migas, namun kontribusinya dalam perekonomian Riau cukup signifikan, yaitu sebesar 15,77 persen pada tahun 2020. Besarnya kontribusi Pekanbaru didukung oleh kekuatan aktivitas

perekonomian di luar migas, yakni lapangan usaha konstruksi, perdagangan, dan industri pengolahan. Selain itu, kabupaten yang juga berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian Riau tanpa migas adalah Indragiri Hilir 8,87 persen.

Untuk mengetahui potensi atau struktur perekonomian yang dimiliki setiap kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau masih mengandalkan lapangan usaha utama pertanian dan pertambangan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sementara Pelalawan, Siak, dan Dumai mengandalkan lapangan usaha industri pengolahan, serta Pekanbaru mengandalkan lapangan usaha konstruksi.

Kabupaten yang masih ditopang oleh lapangan usaha pertanian yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan sangat dominan di Bengkalis mencapai 55,93 persen.

Tabel 3.3 Struktur Ekonomi dengan Migas yang Terbesar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen), 2020

Kabupaten/Kota	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	Pertanian 50,73	Industri 27,68	Konstruksi 7,91
2. Indragiri Hulu	Pertanian 31,26	Industri 28,21	Konstruksi 14,30
3. Indragiri Hilir	Pertanian 46,78	Industri 24,05	Perdagangan 16,14
4. Pelalawan	Industri 48,65	Pertanian 40,62	Perdagangan 2,83
5. Siak	Industri 41,77	Pertambangan 23,44	Pertanian 23,19
6. Kampar	Pertanian 33,14	Industri 25,75	Pertambangan 24,55
7. Rokan Hulu	Pertanian 54,22	Industri 25,26	Perdagangan 5,35
8. Bengkalis	Pertambangan 55,93	Industri 16,99	Pertanian 12,65
9. Rokan Hilir	Pertanian 38,48	Pertambangan 31,84	Industri 21,54
10. Kep. Meranti	Pertanian 39,80	Industri 26,23	Pertambangan 13,84
11. Pekanbaru	Konstruksi 30,17	Perdagangan 29,23	Industri 20,78
12. Dumai	Industri 59,97	Perdagangan 14,48	Konstruksi 10,85
R i a u	Industri 28,27	Pertanian 26,83	Pertambangan 17,86

Secara keseluruhan, dengan memasukkan lapangan usaha migas dalam pembentukan PDRB, maka pada tahun 2020 Provinsi Riau sudah mulai mengandalkan kegiatan ekonomi Industri Pengolahan sebesar 28,27 persen.

Sementara kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berada di posisi kedua sebesar 26,83 persen, dan kemudian diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,86 persen. Kontribusi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian jauh menurun karena disebabkan harga minyak mentah dan komoditas lainnya yang anjlok di tahun 2020.

Lapangan usaha yang masih menunjukkan kinerja positif di tahun 2020 yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Hal ini menyebabkan perekonomian beberapa kabupaten/kota dapat tumbuh positif meski melambat. Kabupaten/kota dengan persentase lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan di atas 70 persen antara lain: Pelalawan 89,27 persen; Rokan Hulu 79,47 persen; Kuantan Singingi 78,41 persen; dan Indragiri Hilir 70,83 persen.

3.3 PDRB Per Kapita dengan Migas Kabupaten/Kota

Tabel 3.4 menunjukkan perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang cenderung menurun selama periode 2018-2020. Perkembangan ini mencerminkan seberapa tinggi tingkat kemakmuran yang telah dicapai oleh penduduk kabupaten/kota pada periode tersebut. Perkembangan PDRB per kapita dapat diinterpretasikan bahwa secara

rata-rata tingkat kemakmuran masyarakatnya mengalami peningkatan atau sebaliknya.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah yang dinikmati per penduduk secara nominal, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah yang dinikmati per penduduk secara riil.

**Tabel 3.4 PDRB Per Kapita dengan Migas
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (juta rupiah),
2018-2020**

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2018	2019*	2020**	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kuantan Singingi	93,90	97,37	102,25	69,60	72,14	72,24
2. Indragiri Hulu	93,07	94,30	94,82	66,32	67,60	66,36
3. Indragiri Hilir	82,28	84,66	86,72	58,78	60,46	59,92
4. Pelalawan	99,99	98,68	99,87	71,74	71,00	69,23
5. Si a k	176,40	167,70	155,01	110,11	108,91	106,16
6. Kampar	90,57	88,71	81,98	58,65	59,57	57,77
7. Rokan Hulu	48,45	48,95	50,23	35,90	36,27	35,47
8. Bengkalis	262,44	247,04	199,99	137,49	133,29	127,46
9. Rokan Hilir	112,76	104,39	92,86	66,17	64,99	62,85
10. Kep. Meranti	98,52	99,15	96,80	66,74	68,08	67,96
11. Pekanbaru	97,17	103,87	98,81	60,95	63,13	59,04
12. D u m a i	109,06	117,05	115,62	77,61	80,49	78,29
R i a u	110,38	109,09	102,29	70,74	71,09	68,74

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

PDRB per kapita Provinsi Riau dengan migas atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dari Rp110,38 juta pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 turun menjadi Rp109,09 juta, dan tahun 2020 turun cukup signifikan menjadi Rp102,29 juta.

Jika dilihat dari PDRB per kapita secara riil (atas dasar harga konstan), PDRB per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2018 yaitu Rp70,74 juta menjadi Rp71,09 juta pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp68,74 juta.

COVID-19 menjadi penyebab utama penurunan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2020, kecuali Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Rokan Hulu yang tercatat meningkat. Sementara untuk PDRB per kapita riil yang meningkat hanya Kuantan Singingi.

PDRB per kapita riil kabupaten/kota periode 2018-2020 dengan kontribusi PDRB migas dominan mengalami tren yang menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Bengkalis, Siak, dan Rokan Hilir mempunyai PDRB per kapita riil masing-masing sebesar Rp137,49 juta, Rp110,11 juta, dan Rp66,17 juta, dan turun di tahun 2020 menjadi Rp127,46 juta, Rp106,16 juta, dan Rp62,85 juta.

B. PDRB tanpa Migas

3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota

Apabila dilihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas, akan tampak perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan dengan migas terutama pada kabupaten/kota dengan kontribusi migas yang besar. Berbeda dengan kabupaten/kota yang tidak mempunyai migas, laju pertumbuhan tanpa migas akan sama dengan laju pertumbuhan dengan migas. Kabupaten/kota tersebut adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru yang merupakan representasi dari perekonomian Provinsi Riau karena posisinya sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan, mencatat laju pertumbuhan ekonomi paling rendah sebesar -4,38 persen pada tahun 2020. COVID-19 sangat berdampak pada PDRB Kota Pekanbaru terutama lapangan usaha konstruksi, perdagangan, transportasi, dan jasa perusahaan.

Dengan struktur ekonomi nonmigas yang tidak jauh berbeda dengan Kota Pekanbaru, menempatkan perekonomian Kota Dumai berada pada posisi ke-2 ikut terdampak dengan laju pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1,53 persen.

Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen), 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	4,66	4,58	0,98
2. Indragiri Hulu	3,70	3,85	-0,26
3. Indragiri Hilir	3,61	4,16	0,34
4. Pelalawan	3,71	4,02	2,20
5. Siak	3,12	4,46	2,02
6. Kampar	3,74	6,51	0,38
7. Rokan Hulu	4,24	4,99	1,68
8. Bengkalis	1,65	4,39	-0,02
9. Rokan Hilir	1,85	2,82	0,93
10. Kep. Meranti	3,90	3,92	-0,37
11. Pekanbaru	5,39	5,99	-4,38
12. Dumai	8,94	6,64	-1,53
R i a u	3,94	4,87	-0,20

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi secara berurut-turut pada tahun 2020 yaitu Pelalawan dan Siak, masing-masing sebesar 2,20 persen dan 2,02 persen. Peningkatan produksi hasil industri pengolahan terutama kertas dan bubur kertas yang masih tumbuh di masa pandemi COVID-19, menyebabkan kedua kabupaten tersebut masih menunjukkan pertumbuhan yang positif meski melambat.

Beberapa kabupaten lainnya yang mengandalkan lapangan usaha perkebunan tercatat masih mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang masih menunjukkan angka positif di beberapa kabupaten, di antaranya: Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir.

Menariknya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tanpa migas pada tahun 2020 menyentuh angka -0,37 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan dengan migas yang tumbuh 0,43 persen. Pada tahun 2020, meski COVID-19 berdampak pada PDRB Kepulauan Meranti, namun masih ditopang dengan kenaikan produksi migas (data dari Dinas ESDM Provinsi Riau).

3.5 Kontribusi PDRB tanpa Migas Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui peran kabupaten/kota dalam perekonomian provinsi dapat dilihat melalui kontribusi PDRB

kabupaten/kota atas dasar harga berlaku terhadap total PDRB pada suatu provinsi.

Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa selama kurun waktu tahun 2018-2020, Kota Pekanbaru menempati urutan teratas dalam pembentukan ekonomi Riau tanpa migas (18,44 persen). Peran yang cukup dominan berikutnya adalah Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Siak dengan kontribusi masing-masing 10,59 persen, 10,38 persen, dan 10,24 persen. Peran keempat kabupaten/kota tersebut sangat signifikan dalam membentuk perekonomian Provinsi Riau tanpa migas, terutama Kota Pekanbaru sebagai pusat konsentrasi aktivitas ekonomi nonmigas.

Tabel 3.6 Kontribusi PDRB tanpa Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen), 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	5,32	5,26	5,39
2. Indragiri Hulu	6,80	6,65	6,64
3. Indragiri Hilir	10,51	10,34	10,38
4. Pelalawan	7,86	7,72	7,98
5. Siak	10,10	9,97	10,24
6. Kampar	9,59	9,67	9,79
7. Rokan Hulu	5,44	5,42	5,66
8. Bengkalis	10,40	10,61	10,59
9. Rokan Hilir	8,66	8,31	8,50
10. Kep. Meranti	2,50	2,48	2,50
11. Pekanbaru	18,96	19,59	18,44
12. Dumai	3,86	3,98	3,91
Total	100	100	100

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara umum pembangunan ekonomi setiap kabupaten/kota berjalan dengan baik yang terlihat dari komposisi kontribusi PDRB dalam perekonomian Provinsi Riau yang relatif stabil hingga tahun 2020. Kondisi ini dapat diartikan adanya keselarasan dalam kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari setiap kabupaten/kota terhadap total penciptaan barang dan jasa di Provinsi Riau. Selama 3 tahun terakhir, tidak terdapat pergeseran komposisi kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap perekonomian Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten hasil pemekaran yang masih relatif baru hanya mampu berkontribusi sekitar 2,50 persen dalam perekonomian Riau.

Sementara itu, kontribusi PDRB Kota Pekanbaru masih paling besar dalam perekonomian Riau. Selain menjadi pusat pemerintahan karena kedudukannya sebagai ibukota provinsi, Pekanbaru juga menjadi pusat perekonomian. Di samping itu, dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang lain, diharapkan mampu menjadi lokomotif baru perekonomian di Provinsi Riau.

3.6 PDRB Per Kapita tanpa Migas Kabupaten/Kota

Salah satu tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang disertai upaya

pengentasan kemiskinan antara lain dengan melakukan perbaikan kondisi kesehatan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kualitas dan menciptakan kemandirian SDM sehingga berpeluang besar dapat berperan dalam memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.

PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 3.7 PDRB per kapita Riau tanpa migas atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2018-2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar Rp83,50 juta naik cukup signifikan menjadi Rp86,45 juta pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 hanya mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp87,66 juta pada tahun 2020. Hal tersebut berbeda pada PDRB per kapita kabupaten/kota yang selama kurun waktu mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2020, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi adalah Siak sebesar Rp127,73 juta, dan jika dilihat secara riil, PDRB per kapita tertinggi selama tahun 2020 juga dicapai oleh Siak dengan nilai Rp89,24 juta. Adanya kenaikan besaran PDRB per kapita, dapat diartikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan Kabupaten Siak yang merupakan daerah pemekaran dengan otonomi daerah berdampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian.

Tabel 3.7 PDRB Per Kapita tanpa Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (juta rupiah), 2018-2020

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2018	2019*	2020**	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kuantan Singingi	93,90	97,37	102,25	69,60	72,14	72,24
2. Indragiri Hulu	89,70	91,26	92,60	65,00	66,31	64,99
3. Indragiri Hilir	82,28	84,66	86,72	58,78	60,46	59,92
4. Pelalawan	97,68	96,81	98,57	70,68	70,05	68,28
5. Si a k	121,06	123,31	127,73	88,04	89,65	89,24
6. Kampar	64,46	67,26	68,91	48,19	50,19	49,30
7. Rokan Hulu	46,74	47,44	49,34	35,21	35,60	34,88
8. Bengkalis	105,15	112,23	114,46	70,59	72,82	72,00
9. Rokan Hilir	71,11	70,52	72,79	50,24	50,41	49,68
10. Kep. Meranti	77,68	81,20	83,84	58,24	60,15	59,56
11. Pekanbaru	97,17	103,87	98,81	60,95	63,13	59,04
12. D u m a i	72,92	78,11	77,89	52,12	54,59	52,84
R i a u	83,50	86,45	87,66	59,28	60,76	59,31

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.7 Struktur Ekonomi Tiga Lapangan Usaha Utama Kabupaten/Kota

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan lapangan-lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Nilai tambah yang terbentuk dari masing-masing lapangan usaha menggambarkan struktur ekonomi dalam wilayah tersebut. Untuk melihat keterbandingan struktur ekonomi kabupaten/kota, berikut disajikan ulasan mengenai distribusi persentase PDRB kabupaten/kota atas dasar harga berlaku tahun 2018-2020 yang dikelompokkan menjadi tiga kegiatan ekonomi utama yakni kegiatan ekonomi primer, sekunder, dan tersier.

Kegiatan ekonomi primer mencakup lapangan usaha pertanian (kategori A) dan pertambangan dan penggalian (kategori B). Sementara kegiatan ekonomi sekunder meliputi lapangan usaha industri pengolahan (kategori C), listrik dan gas (kategori D), pengadaan air dan pengelolaan sampah (kategori E), dan konstruksi (kategori F). Selanjutnya kegiatan ekonomi tersier meliputi lapangan usaha perdagangan (kategori G), angkutan (kategori H), penyediaan akomodasi dan makan-minum (kategori I), informasi dan komunikasi (kategori J), jasa keuangan (sektor K), real estate (kategori L), jasa perusahaan (kategori M dan N), administrasi pemerintahan, dsb. (kategori O), jasa pendidikan (kategori P), jasa kesehatan dan kegiatan social (kategori Q), dan jasa lainnya (kategori R,S,T dan U).

Tabel 3.8 Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Kegiatan Ekonomi Primer, Sekunder, dan Tersier (persen), 2018-2020

Kabupaten/Kota	Primer			Sekunder			Tersier		
	2018	2019*	2020**	2018	2019*	2020**	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Kuantan Singingi	53,28	52,84	54,72	36,52	36,70	35,67	10,19	10,46	9,62
2. Indragiri Hulu	38,55	37,93	39,05	42,50	42,50	42,62	18,94	19,57	18,33
3. Indragiri Hilir	46,01	45,64	47,56	30,32	29,99	30,01	23,67	24,37	22,43
4. Pelalawan	41,41	41,06	42,38	51,50	51,68	51,02	7,08	7,26	6,59
5. Siak	55,10	51,72	46,63	39,54	42,31	47,29	5,36	5,97	6,07
6. Kampar	62,97	60,22	57,69	29,15	31,21	33,68	7,88	8,58	8,62
7. Rokan Hulu	57,31	56,94	58,49	29,08	29,07	28,91	13,61	13,99	12,60
8. Bengkalis	77,27	74,50	68,59	14,53	16,10	20,65	8,20	9,40	10,76
9. Rokan Hilir	76,38	74,21	70,33	17,61	19,05	22,68	6,01	6,74	6,99
10. Kep. Meranti	56,63	54,20	53,64	28,33	29,83	31,37	15,04	15,97	14,99
11. Pekanbaru	1,61	1,56	1,70	49,94	49,55	51,23	48,45	48,89	47,07
12. Dumai	6,03	5,68	6,08	67,96	69,03	71,04	26,00	25,29	22,88
Riau	50,08	47,17	44,69	33,58	35,18	38,04	16,34	17,65	17,27

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada tahun 2018-2020, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau perekonomiannya digerakkan oleh kegiatan ekonomi primer. Kondisi ini terjadi di Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti.

Besarnya peranan kegiatan ekonomi sekunder dalam menggerakkan roda perekonomian mengindikasikan bahwa lapangan usaha industri pengolahan punya kemampuan lebih untuk menggerakkan perekonomian di wilayah tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan kinerja lapangan usaha industri pengolahan harus senantiasa didukung oleh kemudahan

akan ketersediaan bahan baku dan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, kegiatan ekonomi tersier yang merupakan representasi lapangan usaha jasa-jasa, ternyata juga berperan cukup signifikan di Kota Pekanbaru. Hal ini erat kaitannya dengan Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi sekaligus pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Riau. Pada tahun 2020, peran sektor tersier pada ekonomi Kota Pekanbaru mencapai 47,07 persen, tertinggi se-Provinsi Riau.

LAMPIRAN TABEL-TABEL POKOK

<https://riau.bps.go.id>

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13 652 387,35	14 569 280,82	14 633 125,97	15 288 345,11	17 121 654,50
B	Pertambangan dan Penggalian	1 389 268,30	1 441 826,87	1 599 364,86	1 553 019,26	1 344 770,38
C	Industri Pengolahan	7 555 426,64	8 213 896,67	8 603 071,23	8 923 089,98	9 340 928,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12 318,30	14 875,65	16 033,66	17 487,28	18 617,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 754,13	6 285,45	6 307,74	6 443,32	6 483,97
F	Konstruksi	2 114 688,04	2 323 897,36	2 500 733,12	2 748 917,18	2 670 668,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 088 443,14	1 160 969,52	1 242 788,55	1 352 745,99	1 263 096,85
H	Transportasi dan Pergudangan	134 308,23	144 026,48	153 737,94	168 352,94	165 903,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62 580,59	69 405,78	73 965,28	79 398,14	73 071,24
J	Informasi dan Komunikasi	100 767,32	105 373,95	112 612,80	122 924,77	131 653,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	161 181,01	166 542,67	179 871,84	182 672,76	186 131,52
L	Real Estate	205 550,12	222 324,11	234 588,57	248 571,75	251 986,06
M,N	Jasa Perusahaan	275,26	294,84	314,00	333,41	272,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	688 565,93	698 653,07	714 958,59	752 463,26	762 727,10
P	Jasa Pendidikan	168 526,07	174 428,67	184 200,60	197 763,87	205 914,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50 212,66	51 871,34	55 910,10	62 916,93	70 661,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	131 444,80	140 362,79	152 043,09	165 051,71	134 549,27
PDRB DENGAN MIGAS		27 521 697,88	29 504 316,04	30 463 627,94	31 870 497,67	33 749 090,59
PDRB TANPA MIGAS		27 521 697,88	29 504 316,04	30 463 627,94	31 870 497,67	33 749 090,59

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10 005 881,06	10 477 701,24	10 912 694,98	11 353 484,03	11 803 359,11
B	Pertambangan dan Penggalian	1 014 276,10	995 039,62	1 037 204,25	1 017 667,20	937 428,98
C	Industri Pengolahan	6 244 981,53	6 579 328,04	6 967 587,22	7 383 338,86	7 412 126,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8 219,17	8 645,17	9 079,67	9 374,36	9 816,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4 455,33	4 622,54	4 612,99	4 682,64	4 702,78
F	Konstruksi	1 390 304,27	1 458 672,45	1 523 799,71	1 629 246,65	1 576 947,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	733 385,13	761 592,02	801 757,19	840 885,85	752 453,17
H	Transportasi dan Pergudangan	94 000,98	97 647,57	101 113,44	105 286,31	98 195,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	40 791,17	43 292,68	45 216,38	47 532,15	43 035,42
J	Informasi dan Komunikasi	80 594,08	84 163,07	88 839,24	94 942,50	101 816,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	116 079,51	116 174,95	121 399,95	121 489,13	124 144,48
L	Real Estate	146 128,76	149 521,45	155 173,36	161 706,16	163 355,57
M,N	Jasa Perusahaan	196,67	205,45	214,07	220,19	175,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	549 872,65	549 800,18	550 192,12	566 477,81	556 507,80
P	Jasa Pendidikan	114 976,60	116 983,12	121 126,81	127 146,81	129 511,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34 582,86	35 019,53	36 918,10	40 000,76	43 888,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	91 078,93	95 606,12	102 186,55	109 257,86	86 936,48
PDRB DENGAN MIGAS		20 669 804,82	21 574 015,21	22 579 116,04	23 612 739,29	23 844 401,81
PDRB TANPA MIGAS		20 669 804,82	21 574 015,21	22 579 116,04	23 612 739,29	23 844 401,81

Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10 692 978,16	11 163 759,46	11 402 053,50	11 896 981,58	13 324 878,95
B	Pertambangan dan Penggalian	3 744 246,73	3 713 156,53	4 167 845,15	3 904 234,90	3 319 132,10
C	Industri Pengolahan	10 567 967,60	11 030 981,75	11 178 991,68	11 392 173,00	12 024 175,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21 455,91	24 986,89	26 744,72	29 188,20	30 786,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15 976,65	16 520,89	16 833,85	17 208,50	17 628,87
F	Konstruksi	5 246 605,75	5 581 420,72	5 943 388,56	6 267 233,30	6 095 754,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 799 942,73	4 083 075,32	4 368 388,40	4 689 905,90	4 476 507,40
H	Transportasi dan Pergudangan	397 888,47	419 300,45	441 259,05	471 664,60	392 264,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	302 768,76	326 684,79	346 509,44	366 599,50	291 172,29
J	Informasi dan Komunikasi	234 770,40	261 356,07	283 655,18	311 860,10	339 114,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	342 410,62	356 679,27	379 865,42	386 568,10	399 431,75
L	Real Estate	469 484,37	489 519,33	510 448,92	530 647,40	541 231,15
M,N	Jasa Perusahaan	1 221,90	1 333,84	1 433,48	1 561,90	1 252,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	580 959,40	598 060,02	608 941,58	623 484,60	633 676,17
P	Jasa Pendidikan	277 567,14	294 201,66	312 703,30	334 700,40	346 823,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72 832,58	78 246,57	84 230,12	95 350,30	108 314,57
R,S,T,U	Jasa lainnya	264 063,52	287 462,03	312 927,94	339 771,60	284 167,03
PDRB DENGAN MIGAS		37 033 140,69	38 726 745,61	40 386 220,27	41 659 133,88	42 626 312,91
PDRB TANPA MIGAS		35 835 663,75	37 531 201,21	38 922 980,43	40 316 537,18	41 626 600,38

Tabel 4 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7 853 857,44	8 111 374,86	8 412 734,91	8 758 552,89	9 179 932,05
B	Pertambangan dan Penggalian	2 546 812,55	2 486 916,58	2 456 184,69	2 433 077,00	2 368 438,02
C	Industri Pengolahan	8 219 965,12	8 732 695,42	9 065 924,81	9 473 432,00	9 574 779,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14 283,89	14 759,39	15 599,67	16 195,90	16 824,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14 248,02	14 502,67	14 694,27	14 938,70	15 285,28
F	Konstruksi	3 372 626,85	3 512 866,46	3 642 067,69	3 784 551,80	3 667 230,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 534 273,97	2 676 926,78	2 830 091,69	2 960 113,10	2 695 369,24
H	Transportasi dan Pergudangan	298 624,57	306 707,13	315 665,76	324 276,20	264 167,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	208 074,18	217 451,21	228 059,93	238 871,10	187 616,17
J	Informasi dan Komunikasi	188 593,47	202 015,28	216 775,31	232 880,70	253 537,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	247 045,92	246 832,49	254 331,37	255 759,30	264 691,88
L	Real Estate	334 718,47	343 548,83	353 745,07	364 679,50	370 988,46
M,N	Jasa Perusahaan	901,07	961,06	1 013,83	1 070,70	834,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	481 688,77	488 717,49	491 853,00	497 090,80	489 882,98
P	Jasa Pendidikan	187 360,67	195 939,99	206 033,69	216 901,10	221 000,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50 628,07	53 259,53	56 373,78	61 739,60	68 691,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	189 239,26	201 833,64	216 886,05	232 318,40	191 616,22
PDRB DENGAN MIGAS		26 742 942,27	27 807 308,81	28 778 035,54	29 866 448,79	29 830 886,31
PDRB TANPA MIGAS		26 118 805,83	27 200 414,20	28 205 692,77	29 292 882,19	29 216 022,91

Tabel 5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27 552 986,71	29 236 335,98	26 927 354,36	28 014 123,59	30 415 079,73
B	Pertambangan dan Penggalian	348 233,06	505 698,50	762 023,13	602 552,14	511 484,76
C	Industri Pengolahan	14 026 936,13	14 397 752,21	14 522 834,55	14 818 677,41	15 640 822,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26 255,27	32 448,81	34 920,29	36 852,52	39 732,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7 441,95	8 788,20	8 645,64	8 797,96	8 842,52
F	Konstruksi	3 060 023,73	3 394 434,00	3 681 846,96	3 937 743,90	3 825 123,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8 663 606,12	9 437 745,00	10 180 743,29	11 007 083,71	10 497 381,68
H	Transportasi dan Pergudangan	620 283,89	657 686,11	686 049,96	719 685,96	607 065,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	243 068,71	268 596,00	285 914,63	296 852,95	248 186,79
J	Informasi dan Komunikasi	316 048,31	339 794,00	365 683,58	401 589,86	422 941,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	335 642,19	335 915,15	363 319,41	369 840,41	375 802,65
L	Real Estate	444 083,71	489 359,56	518 329,62	550 355,10	556 351,89
M,N	Jasa Perusahaan	1 636,75	1 851,71	2 053,40	2 168,18	1 765,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	992 567,33	1 056 986,00	1 071 743,61	1 102 868,32	1 080 389,44
P	Jasa Pendidikan	323 243,45	342 950,40	368 049,01	394 783,42	405 462,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80 571,03	82 495,00	88 960,48	102 446,16	116 323,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	249 074,60	281 874,31	311 541,40	335 574,13	270 160,59
PDRB DENGAN MIGAS		57 291 702,92	60 870 710,94	60 180 013,34	62 701 995,73	65 022 917,99
PDRB TANPA MIGAS		57 291 702,92	60 870 710,94	60 180 013,34	62 701 995,73	65 022 917,99

Tabel 6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18 590 157,39	19 266 424,51	19 659 507,04	20 445 234,63	21 159 480,59
B	Pertambangan dan Penggalian	239 071,56	343 172,67	507 501,15	509 805,29	470 276,76
C	Industri Pengolahan	10 939 059,92	11 347 065,55	11 712 151,59	12 213 082,72	12 443 702,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17 639,45	18 402,77	19 579,92	19 635,52	21 006,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 932,69	6 864,93	6 734,62	6 844,06	6 871,43
F	Konstruksi	1 972 464,16	2 103 910,80	2 188 885,97	2 295 533,46	2 221 538,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 363 626,94	5 745 547,47	6 142 158,54	6 441 395,07	5 906 697,12
H	Transportasi dan Pergudangan	416 807,14	432 993,18	442 357,40	452 224,12	368 916,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	179 661,50	191 868,57	200 517,66	205 614,81	168 619,63
J	Informasi dan Komunikasi	247 933,95	264 213,81	278 521,61	297 479,96	321 813,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	245 044,59	238 013,56	247 244,40	247 664,35	251 711,41
L	Real Estate	312 734,90	331 004,63	345 267,85	366 087,06	369 564,88
M,N	Jasa Perusahaan	1 122,67	1 212,80	1 323,20	1 358,58	1 075,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	751 722,59	763 718,76	769 198,81	778 258,40	752 653,70
P	Jasa Pendidikan	195 243,36	201 997,16	213 855,28	223 769,32	227 260,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53 786,97	54 283,59	57 704,97	63 454,27	71 297,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	165 562,19	180 676,38	196 226,61	208 122,60	165 124,47
PDRB DENGAN MIGAS		39 697 571,98	41 491 371,15	42 988 736,63	44 775 564,21	44 927 610,71
PDRB TANPA MIGAS		39 697 571,98	41 491 371,15	42 988 736,63	44 775 564,21	44 927 610,71

Tabel 7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16 089 030,02	17 176 849,44	17 791 902,78	18 458 499,94	20 570 996,26
B	Pertambangan dan Penggalian	1 075 781,97	1 082 411,38	1 288 747,27	1 135 770,63	891 243,89
C	Industri Pengolahan	20 138 830,86	21 441 176,45	22 587 198,12	23 439 093,60	24 636 282,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12 776,26	15 278,21	16 776,54	18 573,16	20 110,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 728,66	2 862,87	2 913,35	2 934,76	2 945,63
F	Konstruksi	944 146,25	1 043 478,58	1 121 895,91	1 203 584,43	1 178 919,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 263 680,78	1 348 240,50	1 442 304,47	1 537 122,70	1 430 655,22
H	Transportasi dan Pergudangan	95 292,61	100 903,64	106 976,64	111 403,43	101 760,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79 028,54	84 207,94	88 541,66	91 941,60	77 074,29
J	Informasi dan Komunikasi	195 801,43	210 908,66	227 129,01	244 855,45	262 020,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	232 117,40	244 070,26	263 956,22	268 339,68	274 892,94
L	Real Estate	259 680,91	279 637,45	291 372,33	306 307,36	310 205,02
M,N	Jasa Perusahaan	517,79	544,04	577,80	615,10	472,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	453 292,52	462 772,37	470 283,10	499 508,87	495 692,15
P	Jasa Pendidikan	138 629,80	146 178,43	153 918,48	163 106,23	166 959,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59 966,23	64 599,91	68 318,61	76 722,84	86 144,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	123 565,67	136 521,79	150 678,03	165 728,68	133 374,59
PDRB DENGAN MIGAS		41 164 867,70	43 840 641,91	46 073 490,30	47 724 108,47	50 639 749,95
PDRB TANPA MIGAS		40 300 736,77	42 973 847,61	45 010 182,65	46 821 675,29	49 981 148,68

Tabel 8 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11 355 693,69	11 850 030,58	12 245 245,82	12 624 439,09	13 159 533,50
B	Pertambangan dan Penggalian	648 595,18	632 652,85	624 410,65	595 353,20	617 162,60
C	Industri Pengolahan	15 922 829,63	16 567 469,10	17 233 784,30	18 044 052,46	18 394 220,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8 486,30	9 104,82	9 799,00	10 306,56	11 077,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 194,72	2 233,85	2 259,67	2 273,81	2 279,00
F	Konstruksi	681 434,75	724 486,23	745 804,64	780 244,89	761 396,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	810 577,66	851 187,57	892 635,34	926 138,77	831 911,82
H	Transportasi dan Pergudangan	68 509,22	70 114,63	71 810,49	73 125,70	64 779,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49 571,75	51 192,94	52 939,56	54 477,82	45 292,76
J	Informasi dan Komunikasi	171 418,80	181 089,53	191 605,30	202 282,88	216 877,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	165 395,47	169 874,12	176 781,39	176 871,82	182 119,61
L	Real Estate	191 366,60	198 202,36	203 816,52	210 372,66	212 494,04
M,N	Jasa Perusahaan	380,03	389,51	403,41	416,87	314,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	359 934,38	362 561,98	364 617,94	381 267,58	368 731,49
P	Jasa Pendidikan	93 067,46	95 847,47	98 985,91	102 576,23	103 726,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40 420,60	41 911,32	43 226,10	46 718,23	51 268,21
R,S,T,U	Jasa lainnya	84 340,60	90 829,24	97 936,11	105 551,00	83 962,74
PDRB DENGAN MIGAS		30 654 216,83	31 899 178,08	33 056 062,16	34 336 469,55	35 107 147,08
PDRB TANPA MIGAS		30 144 187,47	31 402 893,78	32 567 125,50	33 876 986,74	34 623 164,64

Tabel 9 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14 570 828,96	15 655 797,49	15 574 601,29	16 173 153,48	18 053 391,68
B	Pertambangan dan Penggalian	28 813 396,88	27 416 903,48	30 855 953,88	26 323 137,19	18 248 362,17
C	Industri Pengolahan	27 933 575,84	28 445 913,27	29 264 706,13	30 350 339,31	32 518 316,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6 032,69	6 986,52	7 388,52	7 964,87	8 600,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 822,21	2 944,69	3 040,19	3 163,81	3 216,47
F	Konstruksi	3 591 254,93	3 815 828,72	4 038 921,95	4 408 861,63	4 284 418,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 562 041,64	1 664 802,98	1 787 956,67	1 980 122,82	1 859 994,92
H	Transportasi dan Pergudangan	81 319,39	86 922,26	93 804,87	102 219,28	95 247,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36 345,54	38 326,40	40 789,80	42 788,04	37 451,40
J	Informasi dan Komunikasi	160 717,41	172 187,17	185 386,45	203 971,45	222 395,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	274 753,19	288 662,01	314 612,41	321 390,11	331 709,53
L	Real Estate	324 228,27	337 321,89	356 670,41	375 887,26	384 073,58
M,N	Jasa Perusahaan	4 349,23	4 620,35	4 814,57	5 233,65	4 148,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	619 670,52	635 667,83	652 172,10	680 253,99	670 656,95
P	Jasa Pendidikan	392 420,91	406 660,96	427 487,16	465 188,98	485 643,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153 569,23	159 505,28	167 675,71	191 351,75	219 345,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	414 606,24	454 467,37	486 929,76	537 900,32	417 159,19
PDRB DENGAN MIGAS		78 941 933,07	79 593 518,66	84 262 911,87	82 172 927,94	77 844 132,91
PDRB TANPA MIGAS		54 735 765,39	56 551 383,27	57 826 208,69	60 423 623,55	64 147 672,46

Tabel 10 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10 978 665,95	11 663 592,50	12 220 025,88	12 608 808,85	13 091 971,59
B	Pertambangan dan Penggalian	14 270 954,80	13 395 097,82	12 564 365,59	11 470 015,25	10 481 403,47
C	Industri Pengolahan	21 393 561,51	21 866 309,46	22 487 632,77	23 673 182,79	24 393 754,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3 924,15	4 052,09	4 178,46	4 281,27	4 552,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 300,75	2 325,66	2 350,42	2 429,28	2 461,83
F	Konstruksi	2 136 627,25	2 225 329,74	2 316 940,26	2 462 210,44	2 383 760,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	989 669,79	1 038 479,47	1 101 594,02	1 154 444,33	1 034 728,03
H	Transportasi dan Pergudangan	58 001,28	60 088,63	62 345,46	64 587,71	57 265,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21 271,99	21 921,64	23 072,38	23 909,92	20 816,51
J	Informasi dan Komunikasi	137 175,59	143 274,28	151 598,19	162 689,56	177 526,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	195 315,17	197 130,66	206 482,05	206 877,04	214 444,47
L	Real Estate	223 668,98	229 534,05	237 889,09	245 311,23	249 506,05
M,N	Jasa Perusahaan	2 854,99	2 975,24	3 066,59	3 195,76	2 467,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	515 527,58	518 873,97	524 126,62	537 870,33	515 387,35
P	Jasa Pendidikan	251 345,88	256 870,46	262 505,36	279 414,39	285 924,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103 544,24	105 978,16	108 569,14	119 987,01	134 685,42
R,S,T,U	Jasa lainnya	272 810,14	297 818,77	318 586,12	347 311,55	263 192,69
PDRB DENGAN MIGAS		51 557 220,02	52 029 652,60	52 595 328,40	53 366 526,69	53 313 850,11
PDRB TANPA MIGAS		39 551 894,28	40 782 491,50	42 054 543,91	43 928 308,26	44 814 464,44

Tabel 11 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18 200 031,39	19 589 815,14	20 289 022,43	21 509 609,82	24 188 132,23
B	Pertambangan dan Penggalian	25 737 541,34	24 678 050,22	28 297 522,98	25 026 733,05	17 915 549,92
C	Industri Pengolahan	15 572 002,11	16 474 469,94	17 000 870,75	18 155 787,63	18 788 309,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	34 422,12	40 839,42	44 162,30	47 818,86	52 805,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3 626,65	3 873,35	3 913,90	4 006,14	4 052,39
F	Konstruksi	4 795 219,92	5 091 358,14	5 439 616,00	5 907 257,61	5 734 653,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 277 153,51	2 433 991,95	2 605 668,44	2 882 334,17	2 564 464,69
H	Transportasi dan Pergudangan	202 868,32	218 379,27	237 613,47	262 554,15	255 688,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58 917,19	62 243,08	65 702,23	70 928,85	60 563,77
J	Informasi dan Komunikasi	253 597,89	272 571,80	287 472,80	311 147,41	336 505,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	283 089,49	298 828,80	322 666,80	328 947,62	340 288,29
L	Real Estate	645 802,44	675 304,70	708 732,34	761 294,37	779 202,63
M,N	Jasa Perusahaan	2 366,89	2 509,84	2 674,80	2 965,52	2 431,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	961 778,39	1 030 103,20	1 089 343,50	1 160 871,25	1 112 762,95
P	Jasa Pendidikan	330 228,12	356 472,55	385 861,40	425 173,83	447 548,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124 707,60	129 922,14	135 765,50	157 017,02	182 089,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	192 901,26	212 289,99	236 320,04	264 367,64	212 145,70
PDRB DENGAN MIGAS		69 676 254,62	71 571 023,54	77 152 929,69	77 278 814,92	72 977 194,00
PDRB TANPA MIGAS		50 151 089,50	52 775 218,87	54 910 576,90	58 593 894,87	61 341 881,36

Tabel 12 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13 672 507,27	14 596 718,09	15 433 672,29	16 318 593,91	17 167 010,24
B	Pertambangan dan Penggalian	13 820 703,87	13 083 378,59	12 362 256,19	11 628 040,39	10 890 713,64
C	Industri Pengolahan	13 205 269,80	14 151 232,34	14 668 084,80	16 051 384,72	15 900 921,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23 273,13	24 392,01	26 011,20	26 894,19	29 187,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 879,92	2 959,69	2 956,00	2 969,21	2 989,62
F	Konstruksi	3 126 365,84	3 236 101,28	3 348 102,70	3 522 445,63	3 406 729,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 453 316,96	1 536 742,34	1 631 825,03	1 717 261,37	1 466 380,94
H	Transportasi dan Pergudangan	147 154,10	155 440,14	162 603,50	170 626,42	156 800,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39 334,12	40 942,43	42 644,20	45 471,64	38 035,57
J	Informasi dan Komunikasi	206 361,69	210 447,66	214 848,00	227 218,44	245 934,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	221 559,57	228 161,44	238 838,70	239 426,07	248 664,16
L	Real Estate	456 799,22	470 366,16	487 883,21	514 402,48	524 572,05
M,N	Jasa Perusahaan	1 709,68	1 782,12	1 870,20	1 992,25	1 587,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	781 992,87	806 552,20	830 096,50	870 312,07	810 955,99
P	Jasa Pendidikan	226 416,26	238 778,59	252 820,70	272 270,23	280 359,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83 104,60	85 589,18	87 618,50	97 350,88	110 360,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	141 465,00	152 427,53	166 709,53	182 203,87	142 696,27
PDRB DENGAN MIGAS		47 610 213,91	49 022 011,79	49 958 841,25	51 888 863,77	51 423 899,12
PDRB TANPA MIGAS		37 651 443,58	39 572 169,48	41 051 194,37	43 721 576,25	43 888 385,90

Tabel 13 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15 231 286,49	16 039 387,56	16 505 992,66	17 333 657,45	19 563 065,91
B	Pertambangan dan Penggalian	1 737 625,60	1 700 841,93	2 000 536,14	1 957 640,96	1 543 781,79
C	Industri Pengolahan	7 198 819,17	7 944 622,31	8 136 537,58	8 497 309,78	9 113 043,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23 664,08	28 120,26	29 793,64	32 561,74	35 361,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 014,72	2 087,20	2 090,23	2 136,27	2 155,00
F	Konstruksi	1 039 993,99	1 127 241,05	1 221 740,80	1 318 024,05	1 280 257,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 645 264,95	1 767 230,42	1 898 178,71	2 118 235,93	1 928 998,26
H	Transportasi dan Pergudangan	157 308,80	172 038,59	186 433,26	204 540,08	198 785,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100 106,12	106 102,58	112 510,14	117 519,84	97 559,44
J	Informasi dan Komunikasi	257 088,77	277 666,09	296 856,57	328 781,68	356 991,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	281 904,59	300 153,30	322 133,83	327 418,77	338 763,30
L	Real Estate	203 681,29	213 890,64	221 416,80	234 360,98	239 722,34
M,N	Jasa Perusahaan	1 448,98	1 573,21	1 705,72	1 884,08	1 510,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	922 910,54	944 360,16	961 526,72	977 166,61	973 313,23
P	Jasa Pendidikan	135 896,49	142 540,55	150 008,34	159 920,88	166 648,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58 907,98	62 113,00	64 892,68	73 939,84	83 414,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	147 692,40	162 336,08	177 831,37	197 139,29	160 335,60
PDRB DENGAN MIGAS		29 145 614,95	30 992 304,95	32 290 185,17	33 882 238,22	36 083 707,45
PDRB TANPA MIGAS		28 242 292,22	30 117 072,59	31 151 233,96	32 831 553,84	35 440 251,42

Tabel 14 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11 563 815,15	12 101 042,82	12 620 204,35	13 163 252,78	13 649 490,40
B	Pertambangan dan Penggalian	1 028 825,70	991 708,37	997 965,69	1 003 840,06	952 749,53
C	Industri Pengolahan	5 749 754,69	6 274 540,51	6 547 380,17	6 992 420,90	7 151 195,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15 785,71	16 690,19	17 488,72	18 136,68	19 394,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1 649,52	1 680,48	1 678,38	1 707,31	1 718,44
F	Konstruksi	649 618,58	690 268,45	728 924,33	774 911,82	749 891,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 065 779,01	1 125 646,45	1 193 617,05	1 267 942,91	1 106 292,30
H	Transportasi dan Pergudangan	113 523,96	120 055,83	125 329,32	131 230,18	120 897,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58 654,30	61 309,47	64 082,91	66 173,97	54 462,78
J	Informasi dan Komunikasi	239 164,13	250 426,39	263 230,12	284 234,61	308 904,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	206 224,30	211 309,26	220 838,57	220 981,97	229 564,61
L	Real Estate	149 148,31	152 640,94	156 323,67	161 068,72	164 169,61
M,N	Jasa Perusahaan	1 015,49	1 074,41	1 149,48	1 226,72	957,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	725 511,97	730 659,61	736 908,43	744 321,71	719 303,46
P	Jasa Pendidikan	85 303,18	88 259,06	91 769,95	96 657,94	98 697,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39 810,38	41 158,70	42 533,37	46 782,88	51 683,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	99 382,54	106 981,14	116 269,57	126 756,13	100 504,26
PDRB DENGAN MIGAS		21 792 966,93	22 965 452,09	23 925 694,06	25 101 647,29	25 479 876,97
PDRB TANPA MIGAS		21 317 098,63	22 512 272,51	23 467 019,04	24 638 890,06	25 053 246,15

Tabel 15 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11 201 413,45	11 985 421,98	12 256 418,55	13 053 199,89	14 662 023,41
B	Pertambangan dan Penggalian	91 923 660,81	88 742 889,96	102 564 234,46	92 403 776,84	64 817 022,52
C	Industri Pengolahan	15 465 796,72	17 154 252,34	17 572 815,19	18 490 471,37	19 691 575,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24 201,21	31 769,01	34 612,46	37 423,43	41 192,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12 379,98	14 148,83	14 389,98	14 907,96	15 221,06
F	Konstruksi	3 295 536,27	3 658 669,79	3 974 961,22	4 253 804,45	4 183 956,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6 924 146,40	7 758 474,88	8 318 439,85	9 186 855,88	8 455 506,01
H	Transportasi dan Pergudangan	297 088,40	336 470,36	349 060,23	370 241,14	291 275,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	329 788,14	352 473,67	372 127,68	382 085,78	311 107,59
J	Informasi dan Komunikasi	357 966,16	405 508,40	436 836,00	487 841,59	538 280,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	323 211,55	333 340,01	357 638,79	363 333,01	377 081,81
L	Real Estate	326 124,59	349 289,70	375 949,32	400 040,72	408 952,42
M,N	Jasa Perusahaan	3 916,98	4 458,99	4 998,32	5 324,41	4 205,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 036 720,92	1 091 009,55	1 123 653,65	1 179 860,44	1 195 661,04
P	Jasa Pendidikan	329 532,63	365 450,99	402 067,84	431 039,31	447 486,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90 326,82	98 688,92	109 650,71	122 310,52	137 672,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	258 692,46	295 852,32	335 445,58	373 329,86	304 446,29
PDRB DENGAN MIGAS		132 200 503,50	132 978 169,70	148 603 299,81	141 555 846,60	115 882 667,46
PDRB TANPA MIGAS		55 039 837,22	57 663 212,77	59 540 790,14	64 309 615,93	66 319 115,46

Tabel 16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7 712 296,91	8 113 972,37	8 556 953,80	9 021 967,83	9 554 639,74
B	Pertambangan dan Penggalian	52 329 818,04	48 890 117,64	46 343 393,91	43 104 200,41	40 365 834,78
C	Industri Pengolahan	11 849 773,19	13 024 989,17	13 294 035,65	14 096 473,44	14 520 026,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16 306,56	17 100,21	18 012,87	18 489,71	19 998,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10 559,62	11 563,43	11 636,83	11 907,29	12 000,17
F	Konstruksi	2 037 913,86	2 179 100,86	2 307 267,04	2 437 250,59	2 388 261,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 212 214,88	4 465 445,56	4 733 215,66	4 974 437,63	4 381 399,09
H	Transportasi dan Pergudangan	210 267,05	227 306,27	231 407,35	240 602,31	178 767,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	175 193,88	182 856,93	191 307,24	195 587,98	158 367,10
J	Informasi dan Komunikasi	320 250,30	337 634,61	356 390,21	388 237,74	428 808,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	235 010,10	229 893,91	235 570,93	236 045,99	245 753,07
L	Real Estate	228 475,26	236 064,56	247 041,56	262 531,06	267 230,37
M,N	Jasa Perusahaan	2 766,13	3 015,25	3 284,87	3 393,27	2 607,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	800 801,99	808 558,08	816 481,95	846 224,81	827 438,62
P	Jasa Pendidikan	199 766,11	207 247,66	225 729,06	238 624,06	243 086,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59 743,03	63 218,19	67 292,86	71 928,19	79 149,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	176 834,63	191 697,74	209 235,84	229 088,06	182 743,55
PDRB DENGAN MIGAS		80 577 991,55	79 189 782,44	77 848 257,65	76 376 990,37	73 856 112,96
PDRB TANPA MIGAS		38 215 470,04	39 325 285,14	39 972 408,72	41 725 233,31	41 716 405,18

Tabel 17 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21 656 350,25	22 727 995,71	23 356 532,60	23 981 439,13	26 150 804,56
B	Pertambangan dan Penggalian	34 936 161,01	33 221 610,44	36 696 633,58	31 372 084,88	21 638 237,54
C	Industri Pengolahan	11 868 195,17	12 904 146,53	13 102 822,91	13 413 249,55	14 634 920,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15 508,87	16 679,41	17 979,93	19 548,11	21 042,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3 008,13	3 248,78	3 138,25	3 150,98	3 172,43
F	Konstruksi	625 979,96	671 428,10	717 455,98	773 005,16	751 622,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 526 436,13	2 727 630,59	2 919 856,18	3 145 805,33	2 912 472,14
H	Transportasi dan Pergudangan	84 340,19	91 224,43	94 871,63	102 722,33	90 346,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	184 115,56	194 445,77	206 835,17	213 885,65	180 744,06
J	Informasi dan Komunikasi	169 534,43	179 706,49	178 398,69	190 453,07	202 141,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	218 394,80	223 037,61	240 606,12	242 928,38	248 528,16
L	Real Estate	231 404,53	239 503,69	251 493,71	261 303,60	264 235,55
M,N	Jasa Perusahaan	146,89	156,94	173,81	187,59	147,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	422 118,61	446 651,15	459 383,41	468 659,78	467 137,31
P	Jasa Pendidikan	166 666,51	175 166,50	183 709,04	194 365,69	202 396,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45 380,41	49 423,56	52 656,28	57 641,21	62 909,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	114 286,33	125 200,42	138 381,45	147 753,95	120 466,18
PDRB DENGAN MIGAS		73 268 027,78	73 997 256,13	78 620 928,77	74 588 184,39	67 951 323,86
PDRB TANPA MIGAS		46 637 400,43	48 597 427,58	49 581 223,51	50 388 840,43	53 269 117,01

Tabel 18 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15 121 134,64	15 855 111,48	16 448 868,83	16 886 232,07	17 453 362,81
B	Pertambangan dan Penggalian	17 616 990,18	16 706 119,65	15 504 186,26	14 710 028,47	13 759 688,27
C	Industri Pengolahan	8 950 881,05	9 646 002,60	9 931 981,87	10 410 507,99	10 663 308,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10 294,65	10 392,92	10 960,89	11 332,27	11 997,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3 687,19	3 712,08	3 478,13	3 491,14	3 509,99
F	Konstruksi	544 603,17	564 045,51	584 504,47	618 363,66	599 008,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 088 252,12	2 228 100,75	2 365 416,94	2 476 211,51	2 220 430,30
H	Transportasi dan Pergudangan	67 574,46	70 949,60	73 151,15	76 918,05	64 886,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85 768,24	87 582,89	91 490,28	93 931,45	79 582,86
J	Informasi dan Komunikasi	138 178,09	139 283,51	136 284,51	142 267,19	151 301,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	155 077,82	157 448,54	164 630,85	164 419,05	169 354,86
L	Real Estate	165 884,42	172 768,62	179 310,67	184 878,98	186 524,40
M,N	Jasa Perusahaan	98,23	103,73	111,59	117,06	89,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	362 662,93	367 102,87	370 677,83	373 805,68	361 283,19
P	Jasa Pendidikan	122 245,56	127 746,61	133 635,36	139 476,84	142 377,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32 478,77	33 268,52	35 001,50	36 932,45	39 521,42
R,S,T,U	Jasa lainnya	90 185,80	95 431,45	102 987,66	107 879,11	86 281,71
PDRB DENGAN MIGAS		45 555 997,33	46 265 171,33	46 136 678,80	46 436 792,99	45 992 508,96
PDRB TANPA MIGAS		33 095 083,34	34 393 889,02	35 029 907,08	36 018 641,11	36 352 593,03

Tabel 19 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5 835 992,56	6 182 926,84	6 365 446,92	6 561 902,03	7 191 110,38
B	Pertambangan dan Penggalian	3 162 468,64	3 035 956,76	3 920 190,12	3 407 928,05	2 499 736,25
C	Industri Pengolahan	3 881 126,79	4 149 099,24	4 289 973,17	4 531 007,83	4 738 170,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6 436,61	7 185,63	7 592,47	8 302,16	9 004,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	659,94	693,19	700,54	741,18	767,46
F	Konstruksi	711 256,11	767 140,85	847 925,28	946 986,01	919 326,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 438 760,87	1 528 699,34	1 631 710,27	1 775 753,36	1 717 662,29
H	Transportasi dan Pergudangan	367 655,45	386 901,66	404 110,21	428 105,00	246 377,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46 951,91	49 106,02	52 190,32	55 865,15	50 149,10
J	Informasi dan Komunikasi	84 604,67	90 185,86	95 731,11	104 757,25	113 611,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	48 236,20	50 147,68	52 804,84	54 009,26	55 189,32
L	Real Estate	68 266,96	72 463,58	75 522,76	80 927,68	82 878,08
M,N	Jasa Perusahaan	510,11	539,91	574,78	611,34	549,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	299 408,24	307 969,26	316 588,24	327 126,64	333 659,90
P	Jasa Pendidikan	36 117,79	37 794,25	39 909,27	42 441,45	44 103,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11 130,32	11 565,93	12 097,17	13 027,41	14 150,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	44 517,14	47 507,44	50 573,10	55 053,51	49 739,30
PDRB DENGAN MIGAS		16 044 100,32	16 725 883,45	18 163 640,55	18 394 545,30	18 066 187,19
PDRB TANPA MIGAS		12 956 639,87	13 766 029,39	14 321 154,02	15 063 179,41	15 647 126,37

Tabel 20 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 360 280,50	4 549 026,83	4 696 434,09	4 827 660,37	5 011 717,40
B	Pertambangan dan Penggalian	1 616 383,63	1 540 817,38	1 614 550,66	1 517 833,62	1 612 496,46
C	Industri Pengolahan	3 343 697,47	3 514 547,64	3 653 190,83	3 808 388,89	3 823 775,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4 282,00	4 412,35	4 552,96	4 732,41	5 044,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	597,22	610,71	610,89	644,76	666,36
F	Konstruksi	448 797,75	474 661,33	507 517,99	558 219,61	539 887,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	902 272,89	947 552,82	1 007 773,55	1 064 816,71	979 433,42
H	Transportasi dan Pergudangan	272 474,72	281 595,13	289 451,98	299 826,79	167 285,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25 066,45	26 135,75	27 505,55	29 138,32	26 051,36
J	Informasi dan Komunikasi	74 090,76	77 099,90	81 367,12	86 731,86	94 147,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	33 826,82	35 029,99	36 125,02	36 474,75	37 160,07
L	Real Estate	51 775,68	53 273,79	54 978,55	57 381,11	58 448,40
M,N	Jasa Perusahaan	385,66	399,12	415,83	430,72	376,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	254 256,65	256 122,71	261 034,86	264 533,64	258 197,90
P	Jasa Pendidikan	22 683,48	23 480,32	24 189,65	25 083,96	25 505,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7 616,06	7 853,25	8 027,50	8 382,23	8 957,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	32 592,50	34 693,79	36 640,21	39 153,34	34 721,19
PDRB DENGAN MIGAS		11 451 080,25	11 827 312,81	12 304 367,23	12 629 433,11	12 683 872,09
PDRB TANPA MIGAS		9 884 116,36	10 334 354,38	10 736 910,18	11 157 904,43	11 116 399,75

Tabel 21 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 509 890,71	1 621 658,46	1 729 630,63	1 833 955,50	1 946 111,85
B	Pertambangan dan Penggalian	18 995,70	20 710,19	21 256,55	20 618,87	20 830,45
C	Industri Pengolahan	18 417 242,80	20 099 476,84	21 162 450,24	22 681 078,15	24 001 303,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	183 141,70	205 159,64	212 257,56	274 125,06	306 932,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14 293,46	15 539,85	15 618,61	16 112,42	16 745,70
F	Konstruksi	27 187 120,62	29 989 751,11	32 830 666,62	35 870 567,63	34 855 986,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27 348 383,98	30 811 637,59	33 073 347,28	37 357 787,58	33 771 530,50
H	Transportasi dan Pergudangan	2 335 054,64	2 548 804,43	2 727 688,42	2 896 124,60	2 281 375,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 941 720,12	2 027 895,79	2 145 686,16	2 202 387,74	1 701 680,61
J	Informasi dan Komunikasi	1 953 261,83	2 102 402,55	2 275 459,07	2 550 253,48	3 217 739,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3 294 182,47	3 290 518,16	3 587 416,90	3 651 286,43	3 810 219,65
L	Real Estate	2 580 851,71	2 675 157,79	2 772 190,07	2 956 323,48	3 038 663,00
M,N	Jasa Perusahaan	16 756,37	18 919,02	21 035,11	23 407,57	18 179,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2 817 609,17	2 932 022,90	3 010 105,43	3 128 882,93	3 193 266,13
P	Jasa Pendidikan	1 029 180,81	1 112 505,68	1 171 978,25	1 262 906,48	1 340 295,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	447 501,33	487 084,48	539 517,15	621 259,21	871 656,88
R,S,T,U	Jasa lainnya	1 034 143,48	1 154 175,53	1 275 068,98	1 414 825,19	1 126 944,20
PDRB DENGAN MIGAS		92 129 330,93	101 113 420,01	108 571 373,04	118 761 902,34	115 519 461,00
PDRB TANPA MIGAS		92 129 330,93	101 113 420,01	108 571 373,04	118 761 902,34	115 519 461,00

Tabel 22 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11 355 693,69	11 850 030,58	12 245 245,82	12 624 439,09	13 159 533,50
B	Pertambangan dan Penggalian	648 595,18	632 652,85	624 410,65	595 353,20	617 162,60
C	Industri Pengolahan	15 922 829,63	16 567 469,10	17 233 784,30	18 044 052,46	18 394 220,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8 486,30	9 104,82	9 799,00	10 306,56	11 077,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 194,72	2 233,85	2 259,67	2 273,81	2 279,00
F	Konstruksi	681 434,75	724 486,23	745 804,64	780 244,89	761 396,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	810 577,66	851 187,57	892 635,34	926 138,77	831 911,82
H	Transportasi dan Pergudangan	68 509,22	70 114,63	71 810,49	73 125,70	64 779,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49 571,75	51 192,94	52 939,56	54 477,82	45 292,76
J	Informasi dan Komunikasi	171 418,80	181 089,53	191 605,30	202 282,88	216 877,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	165 395,47	169 874,12	176 781,39	176 871,82	182 119,61
L	Real Estate	191 366,60	198 202,36	203 816,52	210 372,66	212 494,04
M,N	Jasa Perusahaan	380,03	389,51	403,41	416,87	314,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	359 934,38	362 561,98	364 617,94	381 267,58	368 731,49
P	Jasa Pendidikan	93 067,46	95 847,47	98 985,91	102 576,23	103 726,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40 420,60	41 911,32	43 226,10	46 718,23	51 268,21
R,S,T,U	Jasa lainnya	84 340,60	90 829,24	97 936,11	105 551,00	83 962,74
PDRB DENGAN MIGAS		60 891 070,22	64 619 259,21	68 104 593,01	72 181 895,06	69 016 919,73
PDRB TANPA MIGAS		60 891 070,22	64 619 259,21	68 104 593,01	72 181 895,06	69 016 919,73

Tabel 23 Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 687 641,38	1 806 631,26	1 875 175,33	1 923 177,94	2 079 205,62
B	Pertambangan dan Penggalian	121 859,63	116 791,47	120 044,55	128 171,90	129 579,75
C	Industri Pengolahan	15 088 108,05	16 611 662,24	18 660 477,96	20 865 616,77	21 783 299,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24 522,43	27 095,27	28 102,77	31 766,86	73 723,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4 293,05	4 740,69	4 875,90	5 327,47	5 604,43
F	Konstruksi	3 214 657,79	3 533 022,23	3 786 764,48	4 049 172,47	3 941 634,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 000 294,68	5 250 799,37	5 413 960,62	5 736 846,85	5 257 963,68
H	Transportasi dan Pergudangan	862 149,93	918 537,99	973 792,53	1 055 631,02	726 939,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	260 520,57	280 817,37	303 728,31	319 620,05	258 814,09
J	Informasi dan Komunikasi	294 246,73	333 681,13	380 260,95	418 394,91	457 237,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	367 270,99	375 458,67	390 061,62	397 135,02	409 205,01
L	Real Estate	134 709,46	143 278,75	153 051,06	161 681,12	164 036,60
M,N	Jasa Perusahaan	1 554,95	1 662,75	1 844,96	2 057,23	1 631,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	541 616,22	553 239,20	568 681,02	587 758,74	590 244,82
P	Jasa Pendidikan	149 350,26	155 051,44	161 936,53	177 129,44	185 339,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49 787,22	53 467,50	56 815,08	65 843,06	77 378,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	159 676,94	176 899,26	196 640,11	220 031,06	181 044,05
PDRB DENGAN MIGAS		27 962 260,29	30 342 836,58	33 076 213,76	36 145 361,93	36 322 881,23
PDRB TANPA MIGAS		18 314 051,96	20 109 266,07	22 116 277,49	24 121 252,76	24 470 682,91

Tabel 24 Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 152 198,89	1 190 354,25	1 223 323,23	1 247 698,83	1 299 833,24
B	Pertambangan dan Penggalian	83 885,46	79 731,61	76 741,68	78 506,74	77 486,15
C	Industri Pengolahan	12 032 422,54	12 654 785,36	13 605 104,43	14 580 038,38	15 018 787,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17 107,96	17 285,13	17 840,29	19 141,15	45 610,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3 517,99	3 679,73	3 721,43	3 953,63	4 107,82
F	Konstruksi	2 184 087,17	2 300 697,48	2 360 060,51	2 458 034,29	2 383 801,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 857 613,26	3 967 113,15	4 042 842,71	4 159 510,79	3 730 218,38
H	Transportasi dan Pergudangan	620 938,13	650 890,22	675 937,72	712 132,48	465 476,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	154 066,50	163 772,54	174 345,80	180 951,22	144 751,34
J	Informasi dan Komunikasi	266 883,62	264 907,89	270 436,62	270 749,31	280 072,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	255 850,29	271 847,31	287 481,50	308 203,51	336 681,51
L	Real Estate	96 113,61	99 409,55	103 197,05	108 604,58	110 396,55
M,N	Jasa Perusahaan	1 069,38	1 143,30	1 246,99	1 343,56	1 047,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	430 683,13	431 150,42	432 375,90	442 434,46	432 877,88
P	Jasa Pendidikan	95 154,88	97 723,18	101 574,57	107 280,30	108 792,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32 586,29	34 375,97	36 289,31	40 219,13	46 099,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	107 389,89	115 966,92	125 947,01	137 017,95	109 573,25
PDRB DENGAN MIGAS		21 391 569,00	22 344 834,00	23 538 466,75	24 855 820,30	24 595 613,77
PDRB TANPA MIGAS		13 651 167,91	14 512 117,00	15 808 945,90	16 858 110,73	16 599 503,74



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No 12, Pekanbaru 28131
Telp. (0761) 23042-21336, Fax. (0761) 21336
Homepage: <https://riau.bps.go.id> Email: bps1400@bps.go.id

ISSN 2406-842X



9 772406 842003 >